

Analisis Kritis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia

¹Sri Yunita, ²Ekleisia Br Milala, ³Masriana Siregar, ⁴Roberto Lumban Gaol, ⁵Rohani Panjaitan

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Indonesia

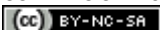
Indonesian Journal of
Learning Studies (IJLS)
Vol. 3, No. 1, 2023
E-ISSN 2775-5231

Corresponding Author:
Sri Yunita
sr.yunita@unimed.ac.id

Published by:

Perkumpulan Dosen Muslim
Indonesia



Copyright © 2025
The Author(s)
This article is licensed under
CC BY-NC-SA 4.0 License


Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali, merinci, dan menganalisis secara mendalam fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam konteks tantangan globalisasi dan pengurangan rasa nasionalisme, PKn berfungsi sebagai alat yang penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, demokrasi, dan cinta tanah air kepada generasi muda. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yang mengandalkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKn memiliki dasar filosofis yang kuat dan berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta didukung oleh landasan hukum dalam UUD 1945 dan regulasi pendidikan nasional. Perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu turut memengaruhi bentuk, pendekatan, dan substansi pembelajaran PKn, mulai dari PMP, PPKn, hingga Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKn di sekolah meliputi rendahnya partisipasi aktif siswa, metode pembelajaran yang masih didominasi oleh hafalan, serta lemahnya penguatan karakter secara nyata. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode pembelajaran yang aktif, terintegrasi, dan kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi dan keterlibatan komunitas sebagai solusi untuk meningkatkan pelaksanaan PKn dengan cara yang efektif dan bermakna.

Keywords : Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikulum Indonesia, Nilai Kebangsaan, Pancasila, Karakter Bangsa.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Namun, keragaman ini juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hal-hal seperti konflik sosial, diskriminasi, dan perbedaan pandangan politik bisa menjadi ancaman yang nyata bagi persatuan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Senada dengan itu, dalam tulisannya berjudul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Jiwa Kebangsaan Bagi Generasi Muda Milenial menyatakan bahwa di tengah era globalisasi dan cepatnya arus informasi digital, generasi muda menghadapi krisis identitas dan semangat nasionalisme yang cenderung menurun, bahkan banyak yang menjadi acuh tak acuh terhadap isu kebangsaan (Difa Rafidatul Aisy, 164–172).

Dalam menghadapi tantangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Melalui proses belajar PKn, siswa diajarkan mengenai pentingnya toleransi, cinta terhadap tanah air, dan kesadaran tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara. PKn menjadi pionir dalam membentuk karakter bangsa melalui pendekatan pembelajaran aktif seperti *Discovery Learning*, yang melatih pelajar untuk berpikir kritis dan menghargai keragaman. Di sisi lain, PKn mendukung generasi milenial agar menjadi agen perubahan yang berjiwa nasionalis, inklusif, dan siap memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan demokrasi. Oleh karena itu, penguatan PKn secara konsisten sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa serta menciptakan karakter warga negara yang kompetitif dan berdasarkan Pancasila (Purwani Puji Utami, 2024).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mampu berpikir kritis, serta bertindak demokratis. PKn tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Zamroni, PKn adalah pendidikan demokrasi yang mempersiapkan masyarakat agar dapat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sementara Somantri menyatakan bahwa PKn berfungsi membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan dasar tentang hubungan masyarakat dan negara, serta pendidikan bela negara. Dalam konteks Sekolah Dasar, PKn sangat penting karena pada usia dini inilah dasar-dasar wawasan kebangsaan dan perilaku demokratis perlu ditanamkan. Pembelajaran PKn diharapkan mampu membentuk karakter siswa sejak dini melalui integrasi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. PKn juga memiliki landasan filosofis sebagai pendidikan dan cara main atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya (Amalia Dwi Pertiwi, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki landasan filosofis yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Landasan ini berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pijakan utama dalam merumuskan tujuan PKn, yaitu membentuk warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Pancasila, nilai-nilai humanisme, demokrasi, dan penghargaan terhadap kebhinekaan juga menjadi bagian dari fondasi filosofis PKn. Secara yuridis, pelaksanaan PKn diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan mainnya. UUD 1945 Pasal 31 menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan PKn sebagai sarana untuk mengembangkan watak serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, regulasi seperti Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan implementasi Kurikulum 2013 serta Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa PKn adalah mata pelajaran strategis dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, landasan filosofis dan aturan main PKn berpadu untuk menciptakan generasi penerus yang cinta tanah air, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (Ina Magdalena¹, 2020).

Metode

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan Kepustakaan/library research . Kegiatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ¹penelitian pustaka merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber yang terdapat diperpustakaan. Sumber-sumber ini dapat berupa buku referensi, hasil penelitian yang relevan sebelumnya, artikel, catatan, serta publikasi jurnal yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Proses ini dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data menggunakan metode atau teknik tertentu, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi (Milya, 2020).

Metode penelitian ini tidak memerlukan penelitian lapangan, melainkan hanya mengandalkan fasilitas yang tersedia diperpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, prinsip, pendapat, gagasan, dan hal-hal lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada analisis proses penarikan kesimpulan, perbandingan, dan analisis dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari individu yang diamati, tanpa menggunakan istilah yang umumnya ada dalam penelitian kualitatif.

Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyiapkan alat bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara dengan mencari dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel, ensiklopedia, serta riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung isi dan gagasan suatu penelitian (Angelia, 2024).

Pembahasan

A. Perkembangan Kurikulum dan Peran Pendidikan Pkn

Dunia pendidikan di Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam perkembangan kurikulumnya. Dalam tulisannya tentang "Perkembangan Kurikulum di Indonesia", penulis menjelaskan secara ilmiah mengenai sejarah kurikulum di tanah air. Menyangkut sejarah kurikulum, dijelaskan bahwa "diskusi mengenai kurikulum tidak dapat dipisahkan dari institusi pendidikan yang menerapkannya. Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, dimotori oleh lembaga pendidikan pesantren. Setelah kemerdekaan, barulah Indonesia mampu mengelola sekolah-sekolahnya sendiri, karena sebelum itu, sistem pendidikan berada di bawah kendali penjajah. Sebelum membahas tentang kurikulum, perlu untuk melihat sejarah pendidikan Indonesia yang berawal dengan hadirnya pesantren, sekolah, dan madrasah. " Pengembangan kurikulum juga ditentukan berdasarkan analisis, perkiraan, serta berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari dalam maupun luar, yang terus berubah (Raharjo, 2020).

Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang cepat. Kurikulum adalah serangkaian rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan tujuan, materi, isi, dan metode pengajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan belajar. Dalam prosesnya, PPKn telah mengalami beberapa perubahan istilah untuk memperbaiki tujuan dan konten dari PKn. Pada awalnya, Pendidikan Kewarganegaraan diperkenalkan dalam Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947 dengan istilah Civics atau Kewarganegaraan sebagai bagian dari pelajaran Tata Negara. Nama mata pelajaran PPKn berubah mengikuti perubahan Kurikulum pendidikan. Dalam Kurikulum 1968, istilah yang digunakan adalah "Pendidikan Kewargaan Negara". Sementara itu, pada Kurikulum 1975, dikenal sebagai PMP yang dijelaskan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Raharjo, 2020). Kemudian, pada tahun 1994, istilah ini berubah menjadi PPKn. Lalu pada tahun 2004, PPKn digabung dengan IPS menjadi PKPS. Dalam kurikulum 2006, KTSP kembali menjadi PKn, dan pada K13, nama mata pelajaran PKn berubah lagi menjadi PPKn. Di dalam Kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam setiap aktivitas pembelajaran, terutama pada pendidikan PPKn.

Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang diperbaiki)

Kurikulum 1975 diperbarui dengan kurikulum 1984. Di dalam Kurikulum 1984, nama PPKn tetap mengacu pada nomenklatur kurikulum 1975 yaitu PMP (Pendidikan Moral Pancasila). PMP menjadi mata pelajaran yang wajib untuk semua siswa di berbagai jenjang pendidikan dan berfungsi sebagai fondasi ideologis dan moral bangsa pada masa Orde Baru. Materi dalam PMP ditujukan untuk menanamkan ideologi Pancasila. Diharapkan, Kurikulum 1984 dapat menjalankan perbaikan dalam sistem pendidikan yang mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam proses pembelajaran di kelas, digunakan model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Pembelajaran PMP mencakup materi aspek pengetahuan, seperti studi tentang Pancasila dan UUD 1945, hak asasi manusia, prinsip dan makna keadilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, lembaga-lembaga negara, dan sistem peradilan.

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 diterapkan setelah keluarnya Surat Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 mengenai Kurikulum Pendidikan Dasar. Perubahan kurikulum ini berpengaruh pada perubahan istilah mata pelajaran PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kelebihan dari Kurikulum 1994 dalam materi PPKn adalah fokus pada pengembangan karakter dan pembentukan nilai-nilai kebangsaan, serta memperluas kajian PMP dengan aspek konsep, nilai, moral, dan norma sesuai Pancasila, di samping memperkuat identitas siswa yang memiliki jiwa nasionalis. Jiwa nasionalis merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Namun, kekurangan dari kurikulum ini adalah metode pembelajaran yang cenderung hanya berupa ceramah, kurang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya, dan menekankan pada mata pelajaran yang padat karena sistem catur Wulan.

Kurikulum 2004 "KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)"

Kurikulum 1994 digantikan oleh Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada tingkat SD, pembelajaran PPKn diintegrasikan secara tematik dengan pelajaran IPS menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Materi pelajaran PKPS mencakup Pancasila, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, konstitusi negara, persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, norma, hukum, peraturan, dan globalisasi. Kelebihan Kurikulum 2004

dalam materi PKPS adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari kompetensi dalam pendidikan PPKn dan IPS yang saling terkait, adanya fokus pada tema dan konsep yang jelas, serta banyak kolaborasi dalam pemecahan masalah. Namun, kelemahan dari kurikulum 2004 ini adalah perlunya keterampilan pedagogis yang baik dari guru untuk menyajikan materi integrasi dari PPKn dan IPS, serta adanya keterkaitan antara keduanya yang tidak selalu dapat dihubungkan dan sering kali terasa dipaksakan.

Kurikulum 2006 “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kehadiran kurikulum 2006 atau KTSP ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 mengenai standar isi kurikulum. Sebelumnya, pada tahun 2004, diterapkan kurikulum yang disebut dengan KBK, di mana mata pelajaran PKn diubah menjadi Kewarganegaraan. Namun, pada tahun 2006, nama tersebut kembali diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Salah satu keuntungan dari kurikulum ini adalah mendorong peningkatan kreativitas guru, kepala sekolah, serta pengelola sekolah dalam menjalankan program pendidikan, karena kurikulum yang ada kini menjadi tanggung jawab penuh sekolah. Ini memberi kesempatan bagi setiap sekolah untuk menyesuaikan dan fokus pada materi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sisi lain, kelemahan dari kurikulum ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjelaskan atau mengimplementasikan KTSP di berbagai instansi pendidikan, serta masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep, penyusunan, dan pelaksanaan KTSP di praktik.

Kurikulum 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum. Dampak perubahan ini terasa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, di mana nama Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang lebih sering disebut PPKn.

Penyempurnaan dari pembelajaran PKn menjadi PPKn membawa kelebihan tersendiri dalam kurikulum 2013 ini, karena menggunakan pendekatan tematik yang memungkinkan integrasi materi PPKn dengan pelajaran lainnya, seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Pendekatan ini menawarkan pembelajaran yang lebih kontekstual atau relevan, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar berbagai aspek pembelajaran. Meski demikian, pendekatan tematik juga menjadi kelemahan dalam kurikulum ini, karena sulit untuk diterapkan di kelas. Semua mata pelajaran yang dipadukan menjadi satu membuat fokus pembelajaran menjadi kurang jelas.

Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka Belajar)

Adanya kurikulum 2020 atau kurikulum merdeka belajar berlandaskan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti. Perubahan pada kurikulum ini berdampak pada penamaan PPKn yang berubah menjadi Pendidikan Pancasila. Namun, isi dari pendidikan kewarganegaraan tidak dihilangkan melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Keuntungan dari kurikulum merdeka belajar untuk PPKn adalah adanya program penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum ini, yang

IJLS Vol. 5 No. 2, 2025

menunjukkan bahwa kurikulum merdeka belajar menjadikan Pancasila sebagai pusat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di sisi lain, kelemahannya adalah kurangnya persiapan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Hal ini dikarenakan materi PPKn yang sangat luas, dan kurikulum merdeka belajar ini menuntut pembelajaran yang sifatnya interaktif (Faradia Syahfitri, 2024).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada siswa. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi terkait pelaksanaan pembelajaran PKN di sekolah dasar, termasuk posisi kurikulum dalam hal ini. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman bagi siswa tentang materi pembelajaran yang perlu mereka pelajari dan pahami, serta arah kajian yang harus mereka ambil di setiap tingkat pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, pengajaran di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik karena segala sesuatunya tercantum dalam kurikulum. Kurikulum adalah inti dari proses pembelajaran, dan pengembangan kurikulum memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian tujuan pendidikan.

Dari segi pelaksanaan, kurikulum juga berfungsi sebagai rancangan dalam pengaturan dokumen yang memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah dapat menggunakan rancangan kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peran tersebut, diperlukan pendekatan yang mengoptimalkan peran kurikulum, termasuk aspek-aspek seperti siswa, sumber pembelajaran, materi, fasilitas pembelajaran, strategi, lokasi, dan tujuan pendidikan (Hermawati, 2024).

B. Landasan dan filosofi dan aturan main PKN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki landasan filosofis yang berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai falsafah hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, serta dasar negara yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks PKN, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan arah dalam membentuk warga negara yang berakarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kelima sila dalam Pancasila diintegrasikan dalam proses pendidikan, dimulai dari penanaman nilai ketuhanan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, hingga pengembangan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, membentuk individu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersikap etis terhadap sesama. Selanjutnya, pendidikan diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, mengembangkan semangat demokrasi melalui musyawarah, serta menciptakan keadilan sosial melalui penanaman nilai empati dan gotong royong (Santoso, 2017).

Aturan main dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merujuk pada peran PKN sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam jurnal "Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum" oleh Marcello Imam Santoso, dijelaskan bahwa PKN tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan hukum. Hal ini bertolak dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi aturan utama atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum di sini berfungsi sebagai alat pengendali, pemberi kepastian, serta pelindung hak asasi manusia.

Aturan main PKN juga berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pendidikan hukum, yang mencakup nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Penerapan pendidikan kewarganegaraan dan hukum ini dilakukan secara bertahap melalui tiga lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, orang tua menjadi teladan dan pendidik utama; di sekolah, peserta didik diajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini; sementara di masyarakat, lembaga hukum, sosial, dan media massa berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman hukum secara adil dan netral. Tujuan utama dari aturan main ini adalah membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu hidup dalam tatanan masyarakat yang demokratis dan berdasarkan hukum (Pertiwi, 2021).

C. Posisi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum nasional (SD, SMP, SMA).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah komponen penting dalam sistem pendidikan di Indonesia yang memainkan peran krusial dalam pengembangan identitas dan karakter siswa sejak awal. Dalam kerangka kurikulum nasional, PKn diakui sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti di semua tingkat pendidikan formal, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan utamanya tidak hanya untuk memberikan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, memperkuat identitas bangsa, dan membimbing siswa agar menjadi warga negara yang mengerti hak dan tanggung jawab mereka, serta aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Di tingkat Sekolah Dasar (SD), PKn diajarkan secara tematik dengan fokus pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kerjasama, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kecintaan terhadap tanah air. Materi ini bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak usia dini agar mereka tumbuh sebagai individu yang bermoral dan memiliki rasa nasionalisme. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pembelajaran PKn berkembang untuk mencakup pemahaman tentang demokrasi, jenis-jenis pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan kesadaran hukum. Di tahap ini, siswa diperkenalkan pada konsep-konsep kewarganegaraan yang relevan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan negara. Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), PKn lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan partisipatif dalam konteks kebangsaan. Siswa dimotivasi untuk memahami isu-isu terkini seperti hak asasi manusia (HAM), fenomena globalisasi, dan tantangan kebangsaan di era digital (Indah Cicilia, 2022).

Selanjutnya, PKn berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal yang terkait dengan konteks lokal di Indonesia. Nilai-nilai seperti religiusitas, toleransi, kejujuran, disiplin, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokratis, dan tanggung jawab berkembang melalui proses pembelajaran PKn. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, tetapi diinternalisasikan melalui praktek, teladan, dan aktivitas sosial yang nyata di sekolah dan masyarakat. PKn juga berperan dalam mengasah kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kecakapan hidup yang diperlukan siswa agar dapat berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara di era global. PKn bukan hanya sekadar mata pelajaran normatif, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kesadaran nasional yang dapat menghasilkan warga negara yang memiliki kesadaran politik,

bermoral, dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas serta kelangsungan demokrasi di Indonesia. Pendidikan ini juga mendorong keterlibatan siswa dalam proses politik, baik di tingkat daerah maupun nasional, melalui pendidikan demokrasi dan pemahaman konstitusi (Widiatmaka, 2022).

D. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi PKn

1. Minimnya Partisipasi Aktif Siswa

Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran PKn adalah rendahnya partisipasi aktif siswa. Hal ini seringkali disebabkan oleh metode pengajaran yang masih berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelas. Pendekatan pembelajaran yang monoton dan tidak interaktif juga turut berkontribusi terhadap rendahnya keterlibatan siswa. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2004), disebutkan bahwa praktek pembelajaran yang terpusat pada guru membuat rendahnya partisipasi aktif siswa sehingga tidak adanya pembentukan karakter yang mengarahkan siswa untuk mampu berpikir kritis terhadap suatu permasalahan (Ari Sujarwadi, 2021).

2. Pembelajaran yang Bersifat Hafalan

Pembelajaran PKn yang cenderung menekankan pada aspek hafalan menjadi tantangan tersendiri. Siswa lebih diarahkan untuk mengingat fakta-fakta dan konsep-konsep tanpa memahami makna dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks nyata. Menurut Fauziah (2023), pembelajaran PKn sangat penting untuk pendidikan karakter sehingga implementasinya dapat membantu dalam pembentukan karakter generasi bangsa di Indonesia.

3. Kurangnya Penguatan Karakter dalam Praktik

Meskipun tujuan utama PKn adalah membentuk karakter siswa, namun dalam praktiknya, penguatan karakter seringkali kurang mendapat perhatian. Pembelajaran lebih berfokus pada aspek kognitif daripada afektif dan psikomotorik. Akibatnya, nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab tidak tertanam dengan baik dalam diri siswa. menunjukkan bahwa pembelajaran PKn sangat penting untuk pendidikan karakter sehingga implementasinya dapat membantu dalam pembentukan karakter generasi bangsa di Indonesia (Gustifal, 2024).

Solusi dalam Implementasi PKn

1. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Kegiatan Sekolah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan seperti upacara bendera, lomba-lomba bertema kebangsaan, dan diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai tersebut, penguatan karakter kebangsaan melalui pembelajaran PKn dapat terlaksana dengan efektif dan siswa terlibat secara aktif melalui metode pembelajaran yang inovatif, seperti discovery learning, ceramah, dan diskusi kelompok.

2. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pembelajaran PKn lebih menarik dan interaktif. Melalui media digital, guru dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih variatif, seperti video, animasi, dan simulasi. Hal ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Menurut artikel di Kominfo (2022), pemanfaatan teknologi internet untuk penguatan Pancasila di era digital menjadi penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah.

3. Pelibatan Komunitas dalam Pembelajaran

Melibatkan komunitas, seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, dalam pembelajaran PKn dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan seperti kunjungan ke lembaga pemerintahan, kerja bakti, dan dialog dengan tokoh masyarakat dapat memperkuat pemahaman siswa tentang peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mereka juga dapat menggunakan pengalaman langsung untuk mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan sosial, dan lainnya (Dyah Arti Mumpuni, 2025).

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran strategis yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter, identitas nasional, dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik di Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi, krisis identitas, serta melemahnya semangat nasionalisme pada generasi muda, keberadaan PKn menjadi semakin vital sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, demokrasi, dan cinta tanah air. PKn tidak hanya berdiri sebagai instrumen transfer pengetahuan tentang negara dan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembelajaran PKn dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, PKn harus dilaksanakan secara holistik melalui pendekatan filosofis, pedagogis, dan praktis, serta didukung oleh kebijakan pendidikan yang jelas. Dari sisi landasan, PKn berdiri di atas fondasi yang kuat: secara filosofis berakar pada nilai-nilai Pancasila, secara yuridis dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang pendidikan nasional, serta secara pedagogis mengacu pada prinsip pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Pancasila tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi juga menjadi dasar arah dan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam membentuk warga negara yang inklusif, demokratis, dan bertanggung jawab.

Referensi

- Amalia Dwi Pertiwi, S. A. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4328 – 4333.
- Angelia, J. A. (2024). Problematika Budaya Membaca Di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research. Jurnal Sains Student Research*, 146-151.
- Ari Sujarwadi, D. A. (2021). Penerapan Metode Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9259-9264.

- Difa Rafidatul Aisy, A. A. (164–172). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Jiwa Kebangsaan Bagi Generasi Muda Milenial. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2022.
- Dyah Arti Mumpuni, A. M. (2025). ENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2548-6950.
- Faradia Syahfitri, D. S. (2024). Analisis Perkembangan Kurikulum Pembelajaran PPKn SD: Implementasi. *Journal of Educational Technology, Curriculum,,* 1-6.
- Gustifal, R. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Mata Pelajaran PPKn di Era Digital. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, :91-100.
- Hermawati, N. (2024). Peran Kurikulum dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 59-64.
- Ina Magdalena¹, A. S. (2020). PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 418-430.
- Indah Cicilia, M. M. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*.
- Milya, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Search) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 41-53.
- Pertiwi, A. D. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4328–4333.
- Purwani Puji Utami, A. A. (2024). Peran PPKn Dalam Memperkuat Persatuan Indonesia di Balik Keberagaman Suku, Ras, Agama melalui Metode Discovery Learning. *Jurnal Citizenship Virtues*, 835–847.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947. *jurnal PKn progresif*, 63-82.
- Santoso, M. I. (2017). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19–26.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.